

# BAB I

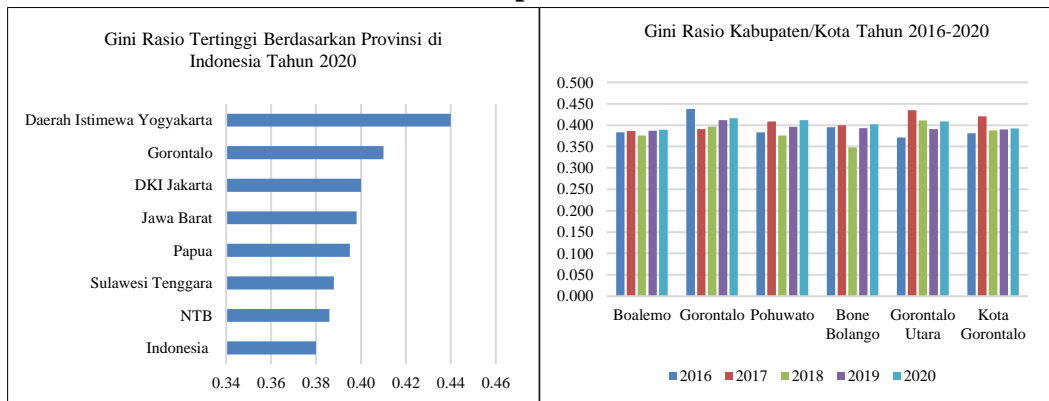
## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Ketika menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi, suatu negara perlu mengetahui corak masalah-masalah pokok yang ada pada negaranya. Salah satu permasalahan ekonomi di suatu negara yaitu ketimpangan pendapatan. Regulasi dan intervensi pemerintah yang tidak pada tempatnya juga dapat menjadi sebab munculnya ketimpangan. Permasalahan ketimpangan pendapatan itulah yang perlu diukur oleh pemerintah dalam rangka mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Ketimpangan yang mencolok memerlukan perhatian dan tindakan penanggulangan yang sungguh-sungguh karena berdampak pada tindakan kriminal, kerusuhan, kekerasan, dll (Ariwibowo, Wirapraja, & Wijoyo, 2018). Fenomena ketimpangan pendapatan ditandai dengan adanya perbedaan yang tidak sepadan pada masyarakat yang mempunyai pendapatan tinggi dengan masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah. Menurut Hirschman, ketimpangan tidak hanya berlaku pada perkembangan ekonomi antar negara, melainkan ketimpangan juga dapat terjadi dalam perkembangan daerah (Jhingan, 2016). Menurut *International Monetary Fund*, ketimpangan pendapatan adalah ketimpangan yang berfokus pada distribusi pendapatan antar individu dan rumah tangga yang terdistribusi dalam suatu populasi (Sastra, 2017).

Salah satu metode yang mengukur pemerataan distribusi pendapatan adalah Gini Rasio, yang mana nilai tersebut menunjukkan seberapa jauh persebaran pendapatan dalam kawasan rumah tangga yang mendapati penyimpangan distribusi yang merata secara sempurna. Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1, semakin nilai Gini Rasio mendekati 0 berarti terjadi kesetaraan sempurna, namun apabila nilainya 1 berarti terjadi ketimpangan yang sempurna. Kriteria Gini Rasio terbagi menjadi lima kategori, yaitu: ketimpangan sangat tinggi ( $GR \geq 0,8$ ), ketimpangan tinggi ( $GR 0,6 - 0,79$ ), ketimpangan sedang ( $GR 0,4 - 0,59$ ), ketimpangan rendah ( $GR 0,2 - 0,39$ ), dan ketimpangan sangat rendah ( $GR < 0,2$ ) (Sastra, 2017).

**Grafik 1. Gini Rasio Tertinggi Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2020 dan Gini Rasio Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Provinsi Gorontalo menduduki peringkat dua teratas sebagai Provinsi dengan ketimpangan tertinggi di Indonesia dengan Gini Rasio sebesar 0,41 angka ini melebihi Gini Rasio Nasional sebesar 0,38 (Badan Pusat Statistik, 2020). Disisi lain, Gini Rasio tertinggi diperoleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,44 apabila dilakukan pengelompokkan kategori tingkat ketimpangannya, Gini Rasio Provinsi Gorontalo termasuk dalam kategori sedang yang terletak antara 0,4 – 0,59 (Sastra, 2017). Fenomena Gini Rasio Provinsi Gorontalo yang lebih tinggi dari Gini Rasio Nasional melatarbelakangi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut permasalahan ketimpangan pendapatan agar masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo mendapatkan kesejahteraan secara adil dan merata.

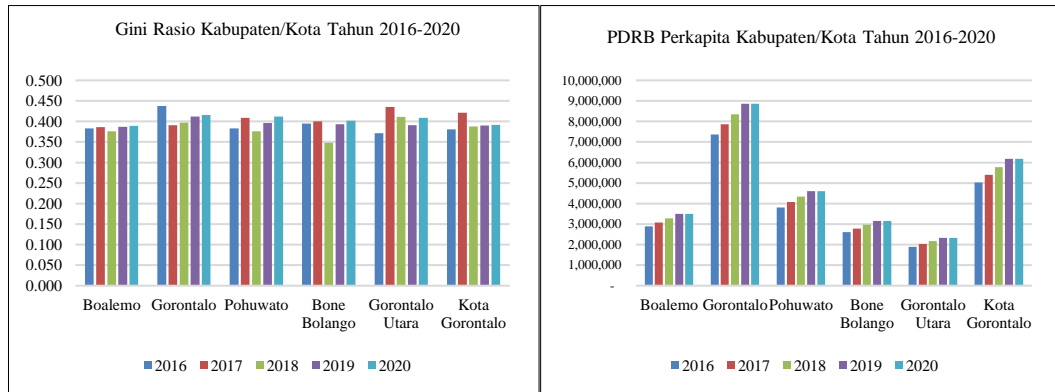
Ketimpangan ini terjadi karena beragamnya potensi sumber daya alam, keadaan demografis, terhambatnya perpindahan barang dan jasa, tenaga kerja, dan kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di daerah tertentu maka dapat mengurangi pemerataan modal dan tingkat perekonomian di suatu daerah (Pemerintah Provinsi Gorontalo, 2020). Kenyataan ini menafsirkan bahwa pemerintah harus lebih totalitas dalam mengakselerasi rencana-rencana pembangunan yang berkaitan langsung dengan distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo.

Gini Rasio tertinggi diperoleh Kabupaten Gorontalo tahun 2016 sebesar 0,438 yang disebabkan oleh meningkatnya ketimpangan pendapatan tahun 2016-2020 dimana keadaan distribusi geografis pendapatan yang tidak merata, kondisi serupa turut dialami Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan

Kabupaten Bone Bolango, Gini Rasio Kabupaten Bone Bolango tahun 2018 mempunyai Gini Rasio terendah diantara Kabupaten/Kota lainnya sebesar 0,348, nilainya menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan dampak dari penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,41%. Kenaikan Gini Rasio Kota Gorontalo dipicu oleh tingkat pengangguran yang selalu meningkat dari tahun 2016-2020, tingkat penganggurannya juga tertinggi diantara Kabupaten/Kota lainnya. Ketimpangan Kabupaten Pohuwato didasari oleh perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang belum merata, infrastruktur yang belum merata, serta tata kelola pemerintah yang belum maksimal yang menjadi penyebab kenaikan Gini Rasio hingga tahun 2020. Sementara itu, Kenaikan Gini Rasio Kabupaten Boalemo disebabkan kurangnya akselerasi secara mendalam program unggulan yang sehingga belum menghasilkan kebijakan yang dapat menunjang kemampuan dan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Boalemo. Dengan adanya permasalahan ini, pemerintah diharapkan mengkaji kembali kebijakan yang diterapkan sehingga pada tahun berikutnya dapat mencapai target ketimpangan pendapatan yang rendah.

Keberhasilan proses pembangunan ekonomi dalam suatu negara ditentukan oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya meningkatkan pendapatan nasional namun tidak menimbulkan masalah lain seperti masalah ekonomi, sosial, dan budaya, serta adanya perkembangan tingkat kemakmuran ekonomi atau tingkat kesejahteraan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain pembangunan diharapkan akan memberikan keberlangsungan hidup yang lebih mumpuni di masa yang akan tiba (Hasan & Azis, 2018). Cara mengetahui apakah pembangunan ekonomi di suatu daerah berlangsung secara merata dapat dilihat dengan membandingkan nilai PDRB perkapita yang dihasilkan pada Kabupaten/Kota. Melajunya tingkat PDRB perkapita pada suatu daerah menandakan adanya potensi sumber penerimaan daerah tersebut akan melaju dengan pesat. Dengan kata lain, ketika kondisi pendapatan tinggi dan diikuti pemerataan akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan (Hartini, 2017).

**Grafik 2. Gini Rasio dan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

PDRB perkapita merupakan cerminan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah dan seharusnya berkaitan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Secara garis besar perekonomian Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo masih bergantung pada sektor Pertanian (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, 2019). PDRB perkapita tertinggi diperoleh Kabupaten Gorontalo sebesar Rp.8,868,730 di tahun 2019 dimana sektor Pertanian senantiasa berkontribusi besar dalam perekonomiannya, kontribusinya selalu meningkat hingga tahun 2020 mencapai 40,45% atau naik sebesar 2,35% dari tahun 2016. Disisi lain, PDRB perkapita terendah diperoleh Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp.1,896,420 di tahun 2016, dimana kontribusi sektor Pertanian selalu meningkat hingga tahun 2020 sebesar 52,52% atau naik sebesar 3,02% dari tahun 2016 namun pertumbuhan sektor ini dan sektor lainnya terus mengalami perlambatan. Sektor Pertanian juga mendominasi Kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Pohuwato yang senantiasa berkontribusi diatas 62% di tahun 2016-2019 dikarenakan produksi, luas lahan, serta harga produk Pertanian selalu meningkat pesat dan berdampak langsung terhadap PDRB, namun tahun 2020 pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap penurunan produksi pertanian yang sangat berperan terhadap perekonomiannya, terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2017 pada Kabupaten Boalemo dikarenakan adanya panen raya pada tanaman pangan maupun hortikultura, peningkatan sektor Pertanian ini juga berdampak pada peningkatan sektor Perdagangan namun di tahun 2020 pandemi Covid-19 berimbas pada penurunan kedua sektor tersebut, Kontribusi sektor Pertanian Kabupaten Bone

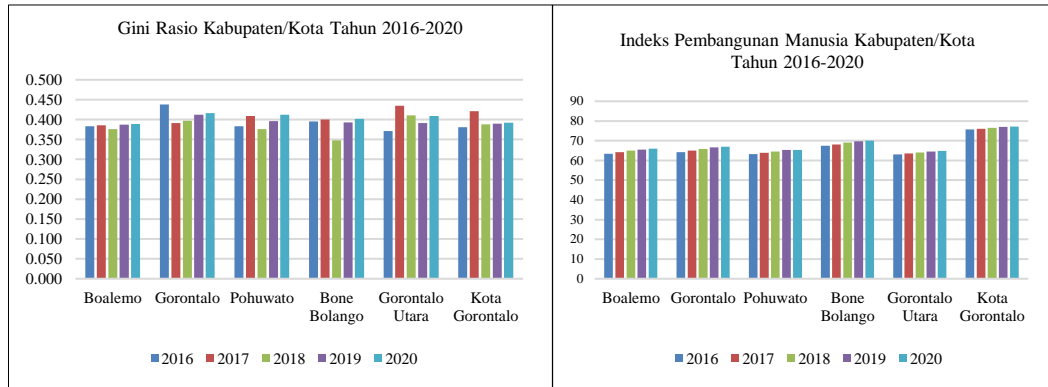
Bolango tahun 2018 sebesar 35,96% atau menurun sebesar 0,2% dari tahun 2016, hal ini dipengaruhi oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi pada tanaman pangan yang selalu menjadi kontribusi utama namun kontribusinya kembali meningkat di tahun 2020. Berbeda dengan daerah lainnya, Kota Gorontalo justru didominasi sektor Perdagangan yang konsisten diatas 18% di tahun 2016-2019, akan tetapi mendapati penurunan di tahun 2020 menjadi 15,92% hal yang mendorong penurunan ini yaitu menurunnya konsumsi masyarakat di masa pandemi Covid-19 sehingga berakibat pada sektor tersebut.

Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo cenderung tinggi namun belum berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat secara langsung dan berkeadilan, sehingga peningkatan perekonomian dinilai belum bermakna bagi sebagian besar masyarakat. Disisi lain, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan secara optimal potensi sumber daya alam lainnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan permasalahan ketimpangan pendapatan (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, 2019). Hal ini tidak sejalan dengan teori Okun dan Richardson bahwa proses pendapatan perkapita mengalami kenaikan yang diikuti dengan depresiasi ketimpangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dengan ditandai lancarnya proses distribusi barang dan jasa (Jhingan, 2016).

Pembangunan ekonomi dinyatakan tercapai apabila suatu daerah mampu memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat dengan merata melalui IPM. Kontribusi IPM memiliki potensi terhadap produktivitas penduduk, tingginya nilai IPM akan menghasilkan tingkat produktivitas penduduk yang semakin tinggi, yang mana akan menunjang tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi, begitu pula sebaliknya (Badan Pusat Statistik, 2020). Salah satu penelitian membuktikan IPM berdampak negatif pada ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa periode 2014-2020, Peningkatan IPM ditandai dengan kemampuan daerah dalam memperoleh kemudahan akses kesehatan dan pendidikan yang layak dapat berpengaruh pada kualitas manusia sehingga mendapatkan pekerjaan dengan upah tinggi. Tingginya rata-rata penghasilan yang diterima akan menurunkan tingkat ketimpangan (Farhan &

Sugianto, 2022). IPM Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo nilainya bervariasi sehingga IPM diduga menjadi faktor yang memicu ketimpangan pendapatan.

**Grafik 3. Gini Rasio dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Faktor pendukung yang mempengaruhi penurunan ketimpangan pendapatan selanjutnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bila suatu daerah mempunyai capaian IPM yang meningkat maka menandakan bahwa daerah tersebut mempunyai sumber daya yang bermutu baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun kemampuan daya beli individu. Diketahui bahwa hanya Kota Gorontalo yang mempunyai capaian IPM diatas Nasional dalam kurun 5 tahun terakhir dan berada di kategori IPM tinggi kisaran  $70 \leq IPM < 80$ , sementara itu capaian IPM pada Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara masih berada di kategori IPM sedang yang berkisar antara  $60 \leq IPM < 70$  (BPS Provinsi Gorontalo, 2020). Kondisi ini selaras dengan penelitian yang dikaji oleh Putri, dkk (2015) yaitu peningkatan kualitas manusia di suatu daerah seharusnya diikuti oleh peningkatan kualitas manusia daerah lainnya agar tidak ada daerah yang mengalami keterbelakangan, dengan adanya pemerataan kualitas manusia diharapkan akan mengurangi masalah ketimpangan.

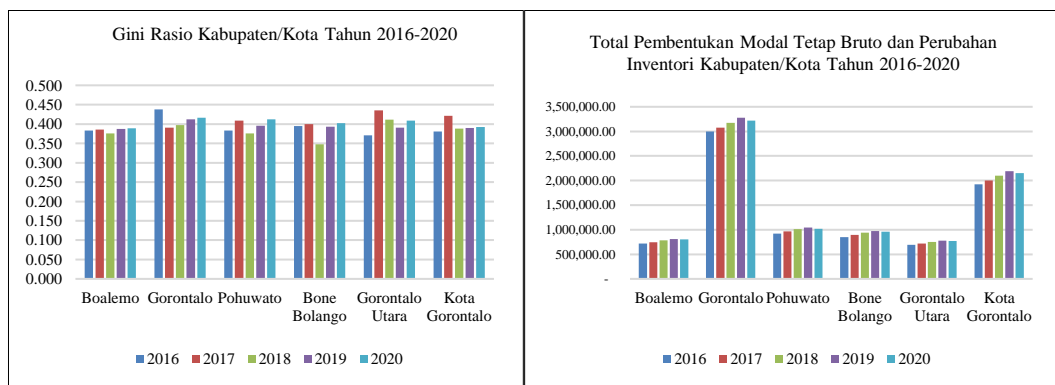
Kota Gorontalo mempunyai IPM tertinggi diantara Kabupaten/Kota lainnya dikarenakan Kota Gorontalo merupakan Ibukota Provinsi, dimana pusat dari berbagai kegiatan seperti pendidikan, perekonomian, dan bisnis, namun masih ditemui permasalahan berupa belum meratanya pembangunan infrastruktur dan sebagian masyarakat belum merasakan akses pelayanan dasar serta tingkat

pengangguran yang ada di Kota Gorontalo tertinggi diantara Kabupaten lainnya. Dalam kurun waktu yang sama, peningkatan IPM Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato tidak luput dari masalah ketimpangan, hal ini dipicu oleh tidak seimbangnya lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja sehingga penyerapan angkatan kerja tidak optimal berdampak pada pendapatan yang tidak merata. Hal ini juga dirasakan Kabupaten Bone Bolango, dimana jumlah lapangan kerja tidak mencukupi jumlah angkatan kerja serta capaian pada komponen pendidikan dinilai masih rendah, sementara itu Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai IPM terendah diantara Kabupaten/Kota lainnya, dikarenakan program yang dijalankan pemerintah belum sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga ketiga capaian komponen IPM dinilai masih rendah, dan ditemui fakta bahwa jumlah penduduk berpendidikan tinggi sangat sedikit dan terpusat di suatu daerah yang menyebabkan kualitas manusia tidak merata. Kabupaten Boalemo ditemui masalah capaian pengeluaran perkapita paling rendah diantara Kabupaten/Kota lainnya yang berdampak pada standar hidup masyarakat serta pemerataan pembangunan pendidikan masih dirasa kurang merata, sehingga masyarakat di beberapa daerah tertentumasih kesulitan mengakses layanan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan IPM tidak selalu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, sehingga bertentangan dengan teori Gary Becker, dimana pendidikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang mengurangi disparitas pendapatan dikarenakan pendidikan mempunyai peran yang menunjang produktivitas perorangan. Apabila tiap masyarakat mempunyai penghasilan yang tinggi kelak pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat ditopang, sehingga hadirnya laju pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan (Sarina, 2019).

Menurut Fleisher, faktor penentu ketimpangan antar daerah mencakup investasi modal fisik, investasi modal manusia, dan investasi modal infrastruktur (Adipuryani & Sudibia, 2015). Investasi adalah pengeluaran yang diperuntukkan menaikkan atau menjamin besarnya persediaan kapital (*capital stock*) tidak sekedar berbentuk modal atau fisik seperti tanah, pabrik dan mesin namun turut mencakup sumber daya manusia. Apabila dilakukannya penanaman modal sesuai sasaran kelak akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Irawan & Suparmoko, 2010). Dengan adanya peningkatan nilai investasi, pemerintah diharap

dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi sehingga pemanfaatan investasi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Menurut Sukirno, penanaman modal yang berbentuk investasi dapat mewariskan kontribusi besar dalam laju peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka dari itu besar investasi diperuntukkan proses produksi barang dan jasa kelak menyerap lebih banyak tenaga kerja dan akan berimbas pada pemerataan pendapatan perkapita (Utami BR Ginting, 2020).

**Grafik 4. Gini Rasio dan Total Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Grafik diatas menyajikan Perkembangan Total Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori, PMTB menjadi penggerak perekonomian terbesar kedua namun nilainya masih sangat bergantung pada pemerintah yang didominasi belanja modal melalui APBN dan APBD (Kemenkeu Dirjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, 2018). Hal inilah yang menjadi faktor penyebab ketimpangan di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo, sehingga kedepannya diharapkan adanya perubahan struktur sumber pertumbuhan di sisi pengeluaran dengan mendorong penguatan investasi. Dilihat dari grafik, Total Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori serentak mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan pemerintah memprioritaskan tiga komponen dalam menangani Covid-19 yang mencakup; urusan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta UMKM.

Nilai investasi fisik tertinggi dicapai Kabupaten Gorontalo tahun 2019 sebesar Rp.3,276,719 perkembangannya meningkat dari tahun 2016 sekitar Rp.282,432 perkembangan investasi fisik berjalan pesat di tahun 2016-2019 dikarenakan pemerintah mempercepat pembangunan jalan dan jembatan yang



berdampak pada kemudahan akses antar daerah yang dapat memberikan peningkatan lapangan usaha, mempercepat pembangunan rusun Mahyani yang puncaknya di tahun 2019 sehingga dapat menekan angka kemiskinan, sementara itu Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai nilai investasi fisik terendah diantara Kabupaten/Kota lainnya di tahun 2016 sebesar Rp.691,092 hal ini dikarenakan banyaknya pembangunan jembatan dan jalan yang belum terealisasi sehingga kurang berkontribusi pada perekonomian, namun tahun 2019 meningkat karena pembangunan pengaman di pantai Seawall Atinggola yang menjadi objek wisata baru sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Berbeda dengan lainnya, sebagian besar investasi fisik Kota Gorontalo justru berkaitan dengan sektor jasa dan perdagangan. Perkembangan investasi fisik Kabupaten Boalemo tahun 2017 didukung oleh percepatan pembangunan kawasan klaster perikanan budidaya yang memberikan kontribusi yang signifikan, pembangunan jalan sentra perikanan di Desa Lamu dan peningkatan ruas jalan di beberapa wilayah mengalami percepatan di tahun 2019. Perkembangan investasi fisik Kabupaten Pohuwato yaitu pengadaan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi di tahun 2017, namun di tahun 2018 pembangunannya masih terkendala pada pembebasan lahan dan pemerintah melakukan percepatan kembali di tahun 2019. Investasi fisik pada Kabupaten Bone Bolango didukung oleh percepatan infrastruktur jalan di tahun 2016 yang sangat menunjang kegiatan masyarakat dan berdampak pada pengembangan kualitas sektor pertanian dan peternakan, pembangunan ini terus dijalankan secara konsisten hingga tahun 2019 dan di tahun 2018 pemerintah mengarahkan anggarannya untuk infrastruktur padat karya sehingga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta mengarahkan sebagian anggarannya untuk operasional pemerintah kelurahan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang telah disesuaikan pemerintah daerah.

Total Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori Kabupaten/Kota mengalami peningkatan namun tidak menurunkan ketimpangan di tahun 2018-2020. Hal ini bertentangan dengan teori Harrod-Domar, yakni pembentukan modal bukan sekedar pengeluaran yang dapat memperoleh kemampuan perekonomian yang dapat memproduksi barang dan jasa namun juga

dapat mengoptimalkan permintaan efektif masyarakat. Dalam perspektif jangka panjang, investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi maka dengan adanya peningkatan investasi turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi pula, hadirnya kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan (Hartini, 2017).

Sebagian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya membahas mengenai pengaruh PDRB perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Total PMTB dan Perubahan Inventori terhadap Ketimpangan Pendapatan. seperti penelitian Hartini (2017), Pratama Maesza, Guntur Eko Saputro, dan Panji Suwarno (2022), Utami BR Ginting (2020), Farhan & Sugianto, (2022), Nurain & Juliannisa (2022), Sarina (2019), Bucevska (2019), Muhtar & W (2021) menyatakan bahwa variabel independen ini dipergunakan memiliki pengaruh pada variabel dependen, yaitu Ketimpangan Pendapatan. Berdasarkan permasalahan yang sudah disampaikan dalam latar belakang, hal tersebut membuat penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo**”.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Provinsi Gorontalo mempunyai nilai Gini Rasio tertinggi kedua di Indonesia. Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo juga termasuk dalam kategori sedang, dimana jika tidak diterapkan penanggulangan kebijakan pemerintah akan memicu timbulnya masalah tindak kriminal, kerusuhan, kekerasan, serta ketegangan politik. Kondisi PDRB perkapita masih mengalami perbedaan yang mencolok pada Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dan masih terdapat gap antara peningkatan PDRB perkapita yang tidak diikuti penurunan tingkat ketimpangan. Pada kondisi yang sama, IPM Kabupaten/Kota turut mengalami peningkatan namun tidak berdampak terhadap penurunan terhadap tingkat ketimpangan, serta kondisi Total Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori mengalami peningkatan namun tidak menurunkan tingkat ketimpangan tahun 2018-2020 dan Total Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori cenderung terpusat di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merumuskan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo?
3. Bagaimana pengaruh Total Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka diketahui tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui pengaruh PDRB perkapita terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
2. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
3. Mengetahui pengaruh Total Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori terhadap Ketimpangan Pendapatan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat secara teoritis maupun praktis diantaranya yakni:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan memperbanyak ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca dalam memperoleh informasi di bidang ekonomi terutama tentang ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Menjadikan dasar acuan, informasi, dan literatur penelitian berikutnya yang hendak mengkaji topik mengenai ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan sebagai bobjek pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan di daerahnya dengan

melihat seberapa berpengaruhnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya Gini Rasio tersebut, sehingga dapat menyetarakan taraf hidup penduduk.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menciptakan pandangan pengetahuan tentang analisis ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
- c. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian diharapkan menjadi pijakan dan bahan rujukan dalam melakukan penelitian berikutnya yang berhubungan ketimpangan pendapatan.